

# 21 MACRO ECONOMICS

# INVESTOR DA

**Edy Bambang, ujar Bambang.**

Pemerintah tidak bisa mengandalkan sektor konsumsi rumah tangga dalam jangka waktu lama. Sebab pemerintah juga tidak akan memberikan bantuan untuk mendorong konsumsi melalui gaji ke-13 dan juga bantuan sosial yang terus menerus.

"Ke depan harus ada pengembangan dengan meningkatkan sumber pertumbuhan lain yaitu investasi," kata Bambang.

Bambang mengatakan, salah satu sumber pertumbuhan yang bisa diandalkan Indonesia adalah investasi. Terlebih, selama ini tren pertumbuhan Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) antara kuartal III-2017 hingga kuartal I-2018 sempat di atas 7%, meski belakangan nilai pertumbuhannya turun lagi ke angka 5%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal II-2018 sebesar 5,27%. Sumber pertumbuhan ekonominya dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) yang merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,76%, diikuti komponen PMTB sebesar 1,86%. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,65%.

la melihat kenaikan investasi akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Saat investasi meningkat maka akan menciptakan lapangan kerja, sehingga nanti mendorong konsumsi masyarakat. Tak hanya itu, investasi juga mendorong produktivitas, sehingga ada kemungkinan ekspor netto juga ikut meningkat.

"Jika dua komponen ini meningkat maka pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik," ujar Bambang.

la mengatakan, bahwa untuk meningkatkan investasi maka perusahaan

terapi ada win win solution, surplusnya jangan terlalu besar," ujar Bambang.

Langkah kedua yang bisa dilakukan adalah mendorong investasi dan perdagangan menjadi satu kesatuan. Mendorong perdagangan tetapi juga di saat bersamaan mendorong investasi ke luar negeri. Namun untuk melakukan ini memerlukan data yang tepat.

"Masalahnya saat investasi Indonesia ke luar negeri pasti orang mengatakan untuk apa pengushaa kita banyak investasi keluar negeri padahal peluang di dalam negeri masih sangat besar," ujar Bambang.

Untuk menyiapkan strategi ini pemerintah harus memiliki data yang baik. Dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) harus bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan agregasi data Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB). Dua Kementerian/Lembaga ini harus bekerja sama agar dapat menyediakan data untuk menghasilkan strategi peningkatan investasi.

"Strategi ini harus didukung data dari investasi yang lengkap sekali, data tidak lengkap maka strategi tidak berjalan. Kami juga ingin tahu sektor mana saja yang memberikan pengaruh besar terhadap investasi," ujar Bambang.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPS Kecuk Suharyanto mengatakan, data investasi yang disediakan baru menurut enam jenis barang yaitu bangunan, mesin dan perlengkapan, kendaraan, peralatan lain, cultivated biological resources, dan produk kekayaan intelektual.

"Dengan keterbatasan data investasi BPS tidak mampu menjawab ketika bicara tentang bangunan, sebab tidak diketahui jenis bangunan gedung atau lapangan usaha apa, dari BUMN atau swasta," ujar Kecuk. (ark)

beritanya yakni sebesar Rp 49 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi menjelaskan, besaran realisasi investasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 16,5 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar US\$ 1 miliar atau senilai dengan Rp 13,4 triliun (kurs APBN

beritanya yakni sebesar Rp 49 triliun.

"Alhamdulillah semester I-2018 ini realisasi investasi di Jakarta tembus angka Rp 58,7 triliun," ucap Edy dalam keterangan resminya, baru-baru ini.

la berpendapat, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki daya tarik yang cukup besar bagi investor, baik asing maupun dalam negeri.

Berdasarkan catatan Badan Koor-

lokasi proyeknya.

DKI Jakarta juga memimpin realisasi investasi PMDN tertinggi dibandingkan provinsi yang lainnya di Indonesia, selama periode semester I-2018, menembus angka Rp 25,3 triliun. DKI Jakarta berkontribusi hingga 16,9% terhadap total realisasi investasi triwulan II-2018 Indonesia yang menyentuh Rp 176,3 triliun.

Sebagai tuan rumah Asian Games

dari perhatian DPMPSTP DKI Jakarta dengan inovasi tiada henti guna para investor untuk modalnya di Jakarta

"Sebagai tuan rumah ga terbesar di Asia, tentu akan menjadi pusat perantara investor yang akan kan modalnya di Jakarta Edy. (try)



THE JAYAKARTA GROUP

**PT. PUDJIADI PRESTIGE Tbk**  
("Perseroan")

## PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 ayat 12 dan ayat 21 huruf d. tentang Dewan Komisaris, sehubungan dengan meninggalnya Almarhum Bapak Ir. KHRH Daryanto Mangunpratolo Yosodiningrat, salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2018, dengan ini kami Direksi PT Pudijadi Prestige Tbk. memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa Perseroan untuk mengisi lowongan anggota Dewan Komisaris yang meninggal tersebut untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 di Jakarta.

Sesuai ketentuan dalam POJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Juncto POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan akan melakukan Pemanggilan Rapat dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, Situs web BEI, dan Situs web Perseroan ([www.pudjiadiprestige.co.id](http://www.pudjiadiprestige.co.id)) pada Senin 10 September 2018.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 9 anggaran dasar Perseroan, Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat dimaksud, baik untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif maupun yang berada di luar Penitipan Kolektif adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Jumat 7 September 2018 Pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukan dalam Acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 24 Agustus 2018.  
Direksi Perseroan